

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DESA LONG AMPUNG KECAMATAN KAYAN SELATAN DI KABUPATEN MALINAU

Iyan¹

Abstrak

Iyan, *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan Di Kabupaten Malinau di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si dan Ibu Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PNPM Mandiri di Desa Long Ampung dilakukan pada pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, tempat sarana umum di pasar, ketrampilan masyarakat. Dalam Program PNPM Mandiri seluruh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa, sampai pada saat pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan PNPM Mandiri seperti kegiatan menjahit yang dilakukan ibu-ibu PKK, kegiatan masyarakat dalam menambang pasir, pembuatan pipa air bersih dan kegiatan lain yang memerlukan partisipasi masyarakat desa Long Ampung. Faktor penghambat dari sebagian masyarakat masih kurang berpartisipasi dan kelembagaan masyarakat kurang aktif dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM yaitu lembaga kemasyarakatan berperan aktif dalam menjalankan program pemerintah, Kepala Desa menanamkan rasa loyalitas kepada masyarakat, peningkatan SDM, peningkatan kelembagaan, lebih ditingkatkan penyuluhan untuk mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam usaha yang menunjang perbaikan sarana prasarana, sosial dan ekonomi, peningkatan kualitas SDM bidang pengembangan keterampilan usaha dan peningkatan kelembagaan masyarakat.

Kata Kunci :PNPM Mandiri

Pendahuluan

Pelaksanaan PNPM Mandiri diharapkan menjadi salah satu program yang mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat yang ada di pedesaan/perbatasan dan diharapkan para pengambil kebijakan, baik yang dipusat maupun yang di

¹Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: iyanjalung@gmail.com

daerah komitmen untuk melaksanakan program tersebut, sehingga apa yang cita-citakan dari program tersebut dapat tercapai dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dasar peraturan perundangan yang digunakan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri yaitu :

- a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Keputusan Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diperoleh informasi bahwa PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Malinau belum terlaksana yang sesuai dengan program yang masih dalam proses pelaksanaan. Sesuai dengan pernyataan misi supervisi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dari pemerintah pusat bersama perwakilan dari *World Bank* (bank dunia) yang berkunjung ke Kabupaten Malinau. Kunjungan ini diterima langsung Wakil Bupati Topan Amrullah S.Pd didampingi Kepala BPMD Malinau Ajang Kahang S.Sos., MSi di ruang kerjanya dalam rangka melakukan evaluasi proses pelaksanaan program dan mendukung PMD.

PNPM Mandiri Pedesaan ini sejalan dengan program daerah melalui program Gerakan Desa Membangun (Gerdema). Namun Pemerintah kabupaten Malinau sendiri terbatas masalah keuangan mendanai kegiatan masyarakat di desa. Hasil Musrenbang tidak dapat menampung semua. Program PNPM ini membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terhindar dari kemiskinan. Ada beberapa kegiatan yang tidak ter-cover di PNPM di APBDes yang dikelola desa dengan total nilai sampai Rp 1,3 miliar. Begitu juga sebaliknya. Fasilitator PNPM di BPMD juga *memback up* program-program di desa dan membantu di BPMD. (www.radartarakan.com. 21-Februari-2014).

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau*".

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Dalam menentukan kebijakan publik, pemerintah memiliki hak untuk mengatur penggunaan seluruh lahan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi, tidak efisien apabila seluruh lahan diatur penggunaannya oleh pemerintah. Pemerintah belum tentu tahu persis penggunaan yang optimal dari seluruh lahan tersebut dan sisi lain, lahan itu sendiri sudah dikuasai masyarakat sebelum UUD 1945 diberlakukan. Penggunaan lahan yang optimal juga berubah dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya sesuai dengan perkembangan lahan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah disatu sisi menjamin terciptanya

penggunaan lahan yang serasi sedangkan di sisi lain memanfaatkan efisiensi yang terkandung dalam mekanisme pasar.

Menurut Dunn (2000:132), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Tahapan Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai : “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses

implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Model-model Implementasi Kebijakan Publik Implementasi Sistem Rasional *Top-Down*. Menurut Parsons (2006;57), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan *top down* memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”.

Masih menurut Parsons (2006;58), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Mazmanian dan Sabatier dalam Ratmono (2008;76), berpendapat bahwa implementasi *top down* adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif *bottom up* adalah Adam Smith. Menurut Smith dalam Islamy, (2001:78), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Pengertian PNPM

Menurut Trijono dan Pranaka dalam Dewanta, (2000:47) PNPM Mandiri adalah salah satu program nasional dalam mewujudkan kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri dalam pelaksanaannya mengedepankan harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dengan prosedur program. Penyediaan pendampingan dan bantuan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan dalam Pedoman Umum PNPM.

Tujuan PNPM

Tujuan PNPM Mandiri secara umum menurut (Departemen Dalam Negeri, 2007) yaitu, meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus dari PNPM Mandiri adalah :

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan dalam proses pembangunan.

- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan Akuntabel.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok peduli lainnya, untuk bersama-sama mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk mengaktifkan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Ruang Lingkup PNPM

Menurut Trijono dan Pranaka dalam Dewanta, (2000:48) ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat yang meliputi :

- a. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya.
- b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui bergulir dan kredit mikro dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar juga harus diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir.
- c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.

Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, dan pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi PNPM

Strategi PNPM mandiri menurut Trijono dan Pranaka dalam Dewanta, (2000:49) terdiri atas :

- 1. Strategi Dasar
 - a. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat.
 - b. Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
 - c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan dan pembangunan partisipatif.
- 2. Strategi Operasional

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok peduli lainnya secara logis.
 - b. Memperkuat peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
 - c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar dan akuntabel.
 - d. Mengoptimalkan peran dalam sektor pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
 - e. Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.
 - f. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.
3. Dasar Hukum PNPM Mandiri
- Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri adalah UUD 1945 beserta amandemennya, Pancasila dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri. Peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara dan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :
1. Sistem Pemerintahan
 2. Sistem Perencanaan
 3. Sistem Keuangan Negara

Pendekatan PNPM

Menurut Trijono dan Pranaka dalam Dewanta, (2000:53) pendekatan atau upaya-upaya nasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian dan Proses Pemberdayaan

Lebih lanjut Freire dalam Soetrisno, (1998:35), bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat mencari cara untuk menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif.

Dengan melihat beberapa pendapat tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah, atau dengan kata lain pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang oleh Chambers (1995:27) dicirikan oleh *people centered, partisipatory, empowering and sustainable*. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi serta daya untuk mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik, dengan demikian pada dasarnya manusia selalu bersifat aktif untuk meningkatkan kemampuan ataupun keberdayaan dirinya.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga fase menurut Pranaka dan Prijono dalam Dewanta, (2000:55) yaitu:

- a. Fase Inisiasi.
- b. Fase Partisipatoris.
- c. Fase Emansipatoris.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri :
 - a. Program penyediaan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya.
 - b. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengembangan keterampilan usaha.
 - c. Program peningkatan kelembagaan masyarakat, masyarakat dan Pemerintah Desa.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau.

Sumber Data

Sumber Data dapat diperoleh dari Kepala Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan dan warga desa yang mengetahui tentang pelaksanaan PNPM Mandiri. Di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber Data ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*),
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian ke lapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara (*interview*)
 - c. Dokumen.

Analisis Data Kualitatif

Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif model interaktif yang di kemukakan oleh Matthew. B Milles dan A. Michael Huberman, dan Jhony Saldana. Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang secara bersamaan : (1) kondensasi data, (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan / verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan PNPM Mandiri

Program Penyediaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman, Sosial dan Ekonomi Secara Padat Karya.

Pedesaan Long Ampung harus dilakukan perkembangan pembangunan dengan dikembangkan sistem prasarana dan sarana desa yang mendukung keterkaitan antar kota, antara desa dan kawasan dalam sistem pedesaan. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana sosial dan ekonomi di desa Long Ampung dilakukan peningkatan penyediaan jaringan listrik yang memadai bagi desa yang jauh dari kota, telekomunikasi yang utama, peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat desa, peningkatan prasarana kesehatan, pengembangan perangkat-perangkat kelembagaan, keuangan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang menjadi dasar hukum PNPM MP sebagaimana menjadi dasar hukum PNPM Mandiri adalah Peraturan Presiden

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Perbaikan sarana prasarana Desa Long Ampung dilakukan di pasar desa RT. 1 dan balai adat di RT. 3, dilakukan pada bulan Februari dan di balai adat pada bulan Agustus 2014. Hal tersebut dilakukan untuk menjual sayur atau hasil tanaman masyarakat. Balai desa dan pasar di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan di Kabupaten Malinau terus dilakukan renovasi.

Program sarana prasarana lingkungan pemukiman, secara padat karya pembangunan bertujuan untuk perkembangan investasi di sektor ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan pencapaian fasilitas keuangan yang berguna menunjang usaha masyarakat. Kegiatannya dari berbagai sektor pembangunan diselenggarakan dengan pemerintah maupun masyarakat di pedesaan, dengan tujuan ketersediaan fasilitas pasar dan fasilitas perdagangan desa lainnya termasuk kemudahan prosedur dan perijinan bagi kegiatan usaha di pedesaan.

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pengembangan Keterampilan Usaha.

Sumber daya manusia yang ada hendaklah dikembangkan sedemikian rupa guna mencapai kesejahteraan. Pengembangan SDM ini amat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan produktivitas SDM dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Masyarakat Desa Long Ampung ditingkatkan dalam pengembangan ketrampilan usaha, yang berasal dari penduduk lokal, dalam pendidikan dan pelatihan anyaman yang berasal dari rotan dan peningkatan bidang kesehatan masyarakat. Secara umum lokasi PNPM Mandiri pedesaan masih mengandalkan tenaga fasilitator Kecamatan dan Kelurahan yang disediakan program. Alokasi programnya dari infrastruktur, sosial dan ekonomi. dan hasil jangka pendeknya dalam perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan usaha dan programnya ke pemerintah daerah, dengan memanfaatkan kelompok usaha masyarakat. Di Desa Long memiliki lembaga koperasi dan membuat kerajinan anjat yang dibuat dari rotan, seraung dan topi putih dengan bahan dari rotan semua. Hasil PNPM dari perlindungan sosial menurut pengelola, memiliki kinerja yang baik disusul pemberdayaan masyarakat yang kemudian dari pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah. Dari pendapat masyarakat, hasil PNPM berupa pemberdayaan masyarakat memiliki

kinerja terbaik disusul perlindungan sosial kemudian pengembangan usaha dan ekonomi kecil menengah.

Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat, Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Kelembagaan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa seperti Gerdema. Upaya ini mencakup peningkatan fungsi dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat perdesaan. Program peningkatan pada kelembagaan masyarakat, masyarakat desa dan Pemerintah Desa dilakukan dari upaya pemantapan kelembagaan perdesaan diarahkan untuk meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan desa pada Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) agar masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Pembangunan di desa Long Ampung, melibatkan partisipasi dan menumbuhkan inisiatif masyarakat untuk membangkitkan dan membina prakarsa masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Long Ampung.

Upaya untuk memberdayakan kelembagaan antara lain melalui pelaksanaan program pembangunan prasarana pendukung yang memberi kepercayaan kepada kelembagaan untuk bertindak sebagai pemilik dan penanggungjawab kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa.

Kelembagaan masyarakat ditingkatkan dipedesaan tergantung dari aktifnya kelembagaan yang ada di desa, harus berguna dalam pengembangan kualitas masyarakat. Kepala Desa harus mengawasi kelembagaan masyarakat desa. Program peningkatan kelembagaan masyarakat dilakukan pada pembinaan pemudanya melalui BPD biasanya memberikan berbagai pelatihan ketrampilan dibidang pertanian, industri, olah raga, kesenian dan lainnya.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Desa Long Ampung.

Faktor penghambat pelaksanaan PNPM desa Long Ampung yaitu dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Desa Long Ampung dari sebagian masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam usaha-usaha yang menunjang berhasilnya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat kurang aktif dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Alam Desa Long Ampung. PNPM mempunyai tujuan pada peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok

masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Desa Long Ampung yaitu lembaga kemasyarakatan sangat berperan aktif dalam menyukseskan setiap program pemerintah, khususnya pemerintahan dikelurahan dalam rangka meningkatkan pengembangan masyarakatnya. Tingginya kemampuan pemimpin informal dalam menanamkan rasa loyalitas kepada masyarakat, senantiasa berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dijalankan termasuk dalam pembinaan pada masyarakat tentang masalah peningkatan SDM dan peningkatan kelembagaan dan peningkatan penyuluhan lebih ditingkatkan untuk mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha yang menunjang berhasilnya penyediaan.

Perbaikan sarana prasarana lingkungan pemukiman juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM, karena merupakan ruang lingkup program PNPM dengan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya. Dan juga ruang lingkup program pada penyediaan sumber daya keuangan melalui bergulir dan kredit mikro dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar juga harus diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir. Pendukung pelaksanaan PNPM pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengembangan keterampilan usaha, peningkatan kelembagaan masyarakat, masyarakat dan Pemerintah Desa dan puskesmas untuk pelayanan kesehatan, untuk dewasa dan balita.

Strategi PNPM terdiri dari mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok peduli lainnya secara logis, menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar dan akuntel, mengoptimalkan peran dalam sektor pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas, meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kabutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dan menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Program PNPM Mandiri di Desa Long Ampung dilakukan pada pembangunan sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan, tempat sarana umum

bagi masyarakat desa di dalam kehidupan sehari-hari di pasar maupun ketrampilan masyarakat. PNPM Mandiri membantu dalam peningkatan tumbuhnya usaha kecil dan menengah yang ada pada masyarakat desa Long Ampung.

2. Dalam Program PNPM Mandiri seluruh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desa, sampai pada saat pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan PNPM Mandiri seperti kegiatan menjahit yang dilakukan ibu-ibu PKK, Kegiatan masyarakat dalam menambang pasir, kegiatan masyarakat dalam pembuatan pipa air bersih dan kegiatan lainnya yang memerlukan partisipasi masyarakat desa Long Ampung.
3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PNPM mandiri Desa Long Ampung yaitu sebagian masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam usaha-usaha yang menunjang berhasilnya pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat kurang aktif dalam peningkatan kualitas SDM masyarakat.
4. Faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM yaitu lembaga kemasyarakatan berperan aktif dalam menjalankan program pemerintah, Kepala desa menanamkan rasa loyalitas kepada masyarakat, peningkatan SDM, peningkatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM bidang pengembangan keterampilan usaha dan peningkatan kelembagaan masyarakat.

Saran

Setelah dengan rendah hati penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan PNPM Mandiri memerlukan partisipasi oleh seluruh masyarakat desa Long Ampung agar pelaksanaan PNPM berjalan baik, terutama berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena tidak semua masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM.
2. Bagi pemerintahan desa, agar dapat meningkatkan kerjasama atau menjalin komunikasi yang baik dengan pengelola kegiatan PNPM Mandiri agar tidak menemukan hambatan dalam menjalankan pelaksanaan PNPM.
3. Sebaiknya masyarakat dapat memanfaatkan program PNPM Mandiri dan berpartisipasi dalam menjalankan pelaksanaan PNPM, masyarakat diharapkan menghadiri apabila ada musyawarah tentang pembangunan dan kegiatan-kegiatan PNPM mandiri yang akan dilakukan.
4. Lebih ditingkatkan penyuluhan untuk mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam usaha yang menunjang perbaikan sarana prasarana, sosial dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Chambers, Robert, 1995, *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Penerbit Kanisus : Yogyakarta.
- Dewanta, Setyawan. 2000. *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*. Aditya Media : Yogyakarta.
- Gibson, James L, John M. Ivancevich dan James H. Donely Jr, 2001. *Organizations: Behaviour, Structure and Proses*, McGraw-Hil Companies Inc, Boston. (Terjemahan Nunuk Adiarni)
- Soetrisno, Lukman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Kanisus : Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo (Anggota IKAPI) : Yogyakarta.